

Media Cetak	Kedaulatan Rakyat
Tanggal	14 Juli 2023
Wilayah	Kabupaten Demak



Selisih Rp 6,433 Miliar Antara LKPJ dan LPP APBD 2022, Menurut Bupati Karena Mendasar Dokumen LKPD Unaudited

Halaman 2

Selisih Rp 6,433 Miliar Antara LKPJ dan LPP APBD 2022, Menurut Bupati Karena Mendasar Dokumen LKPD 'Unaudited'



VARIA LEGISLATIF

DEMAK (KR) - Selain berbuah apresiasi sehubungan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2022 yang disampaikan Bupati dr Hj Eisti'annah pada Rapat Paripurna DPRD Demak juga direspon sejumlah Fraksi dengan beberapa pertanyaan mengenai perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Di samping juga terkait selisih realisasi pendapatan antara dokumen LPP APBD

dan LKPJ sebesar Rp 6,434 miliar.

Seperti disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Demak H Busro, Ketua Fraksi Partai Gerindra H Mu'thi Kholil, dan Ketua Fraksi Amanat Demokrasi H Farodhi, dan Ketua Fraksi Partai Nasdem H Budi Ahmadi. Yang menanyakan alasan hingga munculnya Silpa Rp 142,637 miliar, serta selisih perhitungan realisasi pendapatan antara LPP dan LKPJ APBD 2022.

Sehubungan itu, Bupati Demak dr Hj Eisti'annah menjelaskan, Silpa bebas atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD 2022 sebesar Rp 72,983 miliar adalah Silpa bebas secara keseluruhan. "Sedangkan Silpa bebas yang dipasang dalam APBD 2023 sebesar Rp 109 miliar, sehingga terjadi defisit sebesar Rp 36,016 miliar pada APBD 2023. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD 2023," kata bupati, Selasa (11/7).

Sedangkan terkait perbedaan laporan realisasi pendapatan tahun 2022 antara dokumen LPP APBD dan dokumen LKPJ sebesar Rp 6,434 miliar,



KR - Sari Jati

Bupati dr Hj Eisti'annah bersama para pimpinan DPRD Kabupaten Demak, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak 2022.

menurut bupati, karena dokumen yang digunakan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 'unaudited'. "Di dalam dokumen tersebut terdapat

pengakuan pendapatan yang ditransfer dari Kemenkeu ke rekening Treasury Deposit Facility (TDF) yang berada di Bank Indonesia," imbuhnya.

Sesuai surat dari kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Kementerian Ke-

uangan Provinsi Jawa Tengah Nomor S-802/WPB.14/2023 bahwa pendapatan tersebut dapat dicatat sebagai kas dan setara kas. Yang artinya menambah pendapatan pada tahun berjalan. "Namun saat pemeriksaan BPK terdapat perubahan pengakuan yang dicatat sebagai pendapatan menjadi aset lainnya. Sehingga dikurangkan dari pendapatan," urai bupati.

Kemudian terkait Silpa tahun anggaran 2022 sebesar Rp 142,637 miliar, dijelaskan, bahwa sebagian besarnya merupakan Silpa terikat. Antara lain belanja tunjangan profesi guru, BLUD, Dana Bos, DAK, DID. Selebihnya lagi merupakan efisiensi belanja.

Usai bupati menjawab semua pertanyaan yang disampaikan pada pandangan umum fraksi, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak ke-13 masa sidang kedua tahun 2023 itu pun ditutup Ketua DPRD Kabupaten Demak HS Fahrudin Bisri Slamet. Turut hadir Wabup KH Ali Makhsum, jajaran Forkompimda dan kepala OPD. * ssj